

Biaya Calon Independen

Oleh ASEP SUMARYANA

V/36

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang hanya membolehkan calon dari partai politik atau gabungan parpol telah dikoreksi Mahkamah Konstitusi. Kini calon kepala daerah ataupun gubernur pun boleh mengajukan diri secara perseorangan. Kalkulasi *benefit* dengan risiko pun tidak dapat dilepaskan. Dengan melamar parpol, parpol dapat menjadi *event organizer* atau EO bagi pemenangan dirinya.

Calon tidak terlalu direpotkan dengan urusan teknis pemenangannya. Dengan membayar lambaran dan biaya operasional, calon tinggal melakukan koordinasi dengan parpol terkait. Dalam pemilihan langsung perlu dilinat sinergi elite-kader parpol terkait serta perilaku kader di lapangan. Selain itu, penakaran diri atas penilaian masyarakat pemilih juga tidak dapat diabaikan. Yang tidak kalah penting adalah persepsi masyarakat pemilih terhadap pemilihan itu sendiri.

Menjadi calon independen bisa merasa bebas dari keharusan melamar parpol ketika ikut pilkada. Namun, biayanya tidak berarti lebih sedikit. Meraih suara rakyat pemilih dalam pilkada langsung bisa lebih mahal daripada saat dipilih anggota DPRD. Luas wilayah dan keragaman pemilih bisa menjadi kendala dalam memenangi pilkada.

Oleh sebab itu, perlu pihak lain yang dipercaya membantu keberhasilannya dalam pemilihan. EO menjadi penting untuk dibentuk dengan sejumlah biaya operasional dan sewaan yang harus dipersiapkan. Hitungan miliar rupiah sudah jelas perlu dipersiapkan calon. Hasilnya tidak selalu signifikan.

"Gizi" pemilih

"Gizi" pemilih bukan mustahil yang harus dipikirkan ketika masyarakat menilai calon ataupun kader parpol tidak istimewa. Pemilih memiliki suara yang siap dibeli calon. Melalui kader parpol, suara tersebut dapat langsung dijangkau. Paling tidak keluarga kader dapat diminta memilih jagoan parpolnya. Cendera mata berupa kaus atau topi sudah biasa dibagikan untuk mengikat pemilih. Dengan cara itu belum tentu hasilnya signifikan. Cara lain yang biasa ditempuh adalah membagi angpau, terutama menjelang hari pemilihan. Itu pun sering kali tidak membawa hasil gemilang.

Keharmonisan pengurus parpol dipercaya menjamin kemenangan. Melalui otoritas elite, kadernya bisa *all out* bekerja menyukseskan calon parpolnya. Di lapangan, kerja keras kader parpol belum tentu berhasil mengambil hati rakyat. Faktor perilaku kader bisa menjadi taruhan. Kader parpol yang terpuji di lingkungan masyarakat bisa mendorong semangat pemilih untuk memihaknya.

Faktor lainnya adalah "gizi" untuk pemilih seiring dengan asumsi pemilih menjual suara, calon membelinya. Hal demikian tidak baik dalam pendidikan politik. Namun, sejumlah pengamatan dan pengalaman memperlihatkan bah-

wa kepala daerah akrab semasa kampanye saja. Ini perlu menjadi perhatian.

Semakin besar parpol, semakin besar parpol itu berpeluang dilamar banyak calon. "Uang transferannya" cenderung menebal. Jika kondisi seperti itu dipertahankan, "perusahaan" parpol berkembang. Filosofi parpol untuk mencetak kader bangsa perlu direnungi bersama agar tidak melompat ke konsep perusahaan.

Parpol yang konsisten memajukan perikehidupan bangsa tentu tidak akan berubah menjadi perusahaan, tetapi terus berjuang supaya dapat memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Pembinaan kader pun dilakukan secara lillahi taala. Dalam kondisi seperti itu, simpatisan parpol akan semakin banyak di kalangan *grass root*.

Bobol tanpa gol

Rakyat cerdas tidak dapat dika-dalin parpol. *Beungeut nyanghareup ati mungkir* bisa dirasakan semakin kuat. Munculnya kalangan golongan putih (golput) yang semakin besar pada pemilih terdidik menjadi indikasi bahwa rakyat cerdas, atau bisa juga indikasi membesarnya ketidakpercayaan kepada calon yang dipilih melalui mekanisme pilkada.



Utang budi kepada rakyat perlu dibuktikan dengan program kerja yang jelas dan berpihak kepada rakyat jelata tanpa menumbuhkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) baru.

Parpol dan kadernya tentu tidak dapat memaksakan kehendak kepada pemilih mengingat keduanya tidak ada hubungan kerja. Salah-salah digugat rakyat. Pemilih bisa memilih ataupun tidak, kendati "hak" menerima "suap" sering kali digunakan.

Dengan demikian, pengeluaran besar untuk pilkada tidak selalu berujung kemenangan. Kader bisa menjadi faktor penentu. Perilaku kader selalu diintip untuk diterima ataupun ditolak rakyat. Dengan kesalahan sosialnya, kader akan menjadi contoh dan dituruti, sementara kader yang kesalahan sosialnya besar niscaya akan ditonton dan dicoret dari hati rakyat. Ketika kader menjadi ujung tombak calon, calon

tersebut sangat tergantung pada kesalahan kader tersebut di hati rakyat.

Calon tentu perlu menimbang untuk menjadi independen atau berafiliasi ke parpol. *Milih-milih rabi mindah-mindah rasa* penting untuk memperkecil risiko. Pertimbangan matang dalam mengambil keputusan senantiasa diperlukan. Menguasai hati rakyat tidak mudah dengan *bentik curuk*. Parpol yang menonjol dalam hal tersebut kurang cocok di masa kini. Kader yang adigung dan adiguna pun senantiasa tidak disukai rakyat banyak. Calon yang "merapati" rakyat ketika membutuhkan pertolongan suara tentu dicurigai juga. Oleh sebab itu, calon yang selalu *nulung kanu butuh nalang kanu susah dan nganteur kanu keueung* akan dicari pemilih.

Mengabaikan kualitas diri tentu merugikan juga kendati tebal kantongnya. Sumbangan besar dengan kualitas diri rendah, demikian sebaliknya, bisa jadi dicibirkan rakyat. Agar rakyat mengetahui kualitas dirinya tentu juga tidak mudah. Bisa dipandang takabur ketika menonjolkan diri dalam kebaikan.

Jaringan struktur kelembagaan sosial semacam RT dan RW dan tokoh terkemuka tampaknya perlu dilirik di samping media massa untuk promosi diri. EO perlu memikirkan konsolidasi dengan jaringan tersebut. Hanya saja, kalangan tersebut tidak memiliki hubungan lini dengan calon ataupun manajer. Kecerdikan rakyat bisa menjadi kendala untuk tetap bobol tanpa gol.

Kalkulasi matang dari calon perlu ditimbang cermat. Melamar parpol tentu ada untung-ruginya, demikian dengan jalur independen. Kalangan *incumbent* yang lurus dan sukses menjalankan tugas berpeluang menjadi calon independen dan berhasil. Namun, hal itu tidak berlaku bagi *incumbent* bulus yang memanfaatkan APBD untuk kampanye terselubung. Kantong tebal bukan saja diperlukan calon, melainkan juga kesalahan sosialnya. Biaya pemilihan tampaknya tidak akan terbayar oleh gaji kepala daerah ataupun gubernur selama masa jabatannya. Jangan sampai menjadi penjahat atau mafia setelah menjadi *pangagung*.

Utang budi kepada rakyat perlu dibuktikan dengan program kerja yang jelas dan berpihak kepada rakyat jelata tanpa menumbuhkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) baru. Ketakutan rakyat untuk dilupakan ketika sudah berkuasa perlu dieliminasi. Jika dilakukan juga, bisa-bisa tidak ada pilihan kecuali tetap menguras tanpa memihak. Bila demikian, tidak ada perbedaan signifikan antara calon dari parpol dengan calon independen sehingga golput tidak akan surut dengan munculnya calon independen, dan penyimpanan pun tetap membara.

ASEP SUMARYANA
Lektor Kepala pada
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
FISIP Universitas Padjadjaran dan
Sekretaris LP3AN
Universitas Padjadjaran

kompas, 24/09/07

SE
OR
CH
IL
AW
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52